



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN ACEH**

PERJANJIAN
KINERJA
TAHUNAN DAN TRIWULANAN

2019

Nomor : S-0072/PW01/6/2019
Tanggal : 7 Januari 2019



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN ACEH**

بدان فعاواسن كاواقن دان فمباقونن فرواكيلن احيه

Jalan Tgk. Panglima Nyak Makam Banda Aceh, 23118
Telepon (0651) 28133, 28134 dan 28183, Faks 28173

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan Fuady
Jabatan : Kepala Perwakilan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Ardan Adiperdana
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2019

Pihak Kedua,

Ardan Adiperdana
NIP 19590616 197911 1 001

Pihak Pertama,

Ichsan Fuady
NIP 19651030 199303 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP ACEH**

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
A. Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	1.1 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	70
	1.2 Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor CGC baik *)	%	75
	1.3 Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik *)	%	60
	1.4 Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	%	60
	1.5 Persentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	%	65
2. Meningkatnya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian	2.1 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	%	60
	2.2 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	%	75
	2.3 Persentase Hasil Pengawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	70
	2.4 Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	80
	2.5 Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	80
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1 Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	80
4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	4.1 Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	55
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1 Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	70
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	6.1 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	0
	6.2 Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	100
	6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	91
	6.3 Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	9
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	7.1 Persentase APSP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	100
	7.2 Persentase APSP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0
	7.3 Persentase APSP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	91
	7.4 Persentase APSP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	9

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Laporan	54
1. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	1.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Proyek Strategis dan Prioritas Presiden Perwakilan BPKP	Laporan	101
2. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	2.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pembangunan Prioritas Nasional Perwakilan BPKP	Laporan	12
3. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi	3.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penerapan SIMDA Integrasi Perwakilan BPKP	Laporan	16
4. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Dana Desa	4.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dana Desa Perwakilan BPKP	Laporan	6
5. Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019	5.1 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Pemilu Tahun 2019 Perwakilan BPKP	Laporan	48
6. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SIPP Perwakilan BPKP	6.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SIPP Perwakilan BPKP	Laporan	31
7. Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APP Perwakilan BPKP	7.1 Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kapabilitas APP Perwakilan BPKP	Laporan	8
A Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	skala 1-10	
1. Tersedianya Dukungan Teknis Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	1.1 Kepuasan atas Pelayanan Ketatausahaan Perwakilan BPKP	Laporan	12
B Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	unit	12
1. Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dalam Mencapai Kepuasan Layanan	1.1 Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	unit	13
2. Termanfaatkannya Aset secara Optimal	2.1 Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP		
	2.2 Tersedianya Metabelair Perwakilan BPKP		

Kegiatan	Anggaran
1. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SIPP	Rp. 4.113.880.000,00
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP	Rp. 19.299.193.000,00
3. Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	Rp. 610.148.000,00
4. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana	Rp. 132.190.000,00
Jumlah	Rp. 24.155.411.000,00



PERJANJIAN KINERJA TRIWULANAN TAHUN 2019
PERWAKILAN BPKP ACEH

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		Target Trw I		Target Trw II		Target Trw III		Target Trw IV		Target Setahun	
		Satuan	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
A. Sasaran Program	2		4	5	6	7	8						
1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi	Indikator Kinerja Program												
	L1. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan	%	0	25	50	70	70						
	L2. Persentase BUMN/Anak Perusahaan dengan Skor GCG baik *)	%	0	75	75	75	75						
	L3. Persentase BUMN/Anak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat Minimal A (baik *)	%	0	0	0	0	0						
	L4. Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang dievaluasi	%	0	5	30	60	60						
	L5. Persentase BLUD yang Tatakelolanya Minimal Baik dari BLUD yang dievaluasi	%	0	0	40	65	65						
2. Meningkatkan Efektivitas Hasil Pengawasan dan Keinvestigasian	2.1. Persentase Hasil Pengawasan dan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan	%	0	20	40	60	60						
	2.2. Persentase Hasil Pengawasan dan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH	%	10	20	30	75	75						
	2.3. Persentase Hasil Pengawasan dan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	30	40	70	70						
	2.4. Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	80	80	80						
	2.5. Persentase Hasil Audit Klaim yang Dimanfaatkan oleh K/L/P/K	%	0	0	0	0	0						
3. Meningkatnya Penyelesaian Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional	3.1. Persentase Penyelesaian Hambatan Kelancaran Pembangunan	%	0	0	0	80	80						
4. Meningkatnya Kualitas Tatakelola Pemerintah dan Korporasi dalam Pencegahan Korupsi	4.1. Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA)	%	0	0	55	55	55						
5. Meningkatnya Kepedulian K/L/P/K dan Masyarakat terhadap Korupsi	5.1. Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat	%	0	0	0	70	70						
6. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemda	6.1. Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 3	%	0	0	0	0	0						
	6.2. Persentase Pemerintah Provinsi dengan Maturitas SPIP Level 2	%	0	0	100	100	100						
	6.2.3. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3	%	39	91	91	91	91						
	6.2.2. Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2	%	61	9	9	9	9						
7. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	7.1. Persentase APJP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 3	%	0	100	100	100	100						
	7.2. Persentase APJP Pemerintah Provinsi dengan Kapabilitas Level 2	%	0	0	0	0	0						
	7.3. Persentase APJP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3	%	39	50	91	91	91						
	7.4. Persentase APJP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2	%	61	50	9	9	9						

